



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MAHRUS
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 511097

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 935.771.125

1. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m2/60 m2 di KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 385.885.000
2. Tanah Seluas 133 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 490.101.125
3. Tanah Seluas 150 m2 di INDRAMAYU, HIBAH TANPA AKTA Rp. 59.785.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 18.100.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000
2. MOTOR, YAMAHA JUPITER MX 1 S7/SPD. MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.300.000
3. MOTOR, YAMAHA 28D MIO/AL115S AT Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000
4. MOTOR, HONDA X1B02R07L0 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.700.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 44.429.634

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. 9.717.694

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 14.177.826

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. 29.580.650

**Sub Total**

Rp. 1.051.776.929

**III. HUTANG**

Rp. 174.997.400

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 876.779.529

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.